

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan dalam bab ini memiliki peranan yang penting, karena melalui penelusuran kajian pustaka, penulis dapat menemukan sumber-sumber tertulis yang akan digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. Menurut Paltridge dan Starfield (dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, hlm. 26-27) mengemukakan bahwa pemaparan kajian pustaka dalam skripsi sifatnya lebih deskriptif, berfokus pada topik, dan lebih mengedepankan sumber rujukan terkini.

Isi kajian pustaka yang akan diuraikan dalam bab ini meliputi beberapa buku sebagai sumber utama. Adapun buku-buku utama yang digunakan penulis berkisar mengenai Robert Mugabe dan Zimbabwe. Kemudian, penulis juga mengambil beberapa konsep yang relevan untuk dikaitkan dengan judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Sesuai dengan judul skripsi ini yang mengenai *Zimbabwe pada Masa Pemerintahan Robert Mugabe (1980-2008)*, maka penulis mengambil tiga konsep yang akan digunakan. Ketiga konsep tersebut antara lain konsep pemerintahan, kekuasaan dan kebijakan. Fungsi dari penggunaan konsep ini salah satunya seperti yang diutarakan Sjamsuddin (2012, hlm. 36) bahwasannya “konsep-konsep membantu kita mengidentifikasi dan memahami berbagai objek, peristiwa, individu, atau ide yang ditemukan di sekitar kita”. Selain menggunakan beberapa konsep tersebut, penulis juga menemukan beberapa penelitian terdahulu berupa karya tulis ilmiah baik itu dalam bentuk artikel jurnal maupun dalam bentuk skripsi. Fungsi dari penelitian terdahulu ini sebagai rujukan sekaligus patokan dalam mengisi kekosongan, sebagai pembeda, sebagai pembanding, dan saling melengkapi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti melalui penulisan skripsi ini. Adapun uraian dari buku-buku sebagai sumber utama, konsep-konsep, dan penelitian terdahulu akan dijelaskan di bawah ini.

2.1 Kajian Buku

2.1.1 Robert Mugabe

Buku yang pertama penulis gunakan berjudul *Mugabe*. Buku ini merupakan biografi mengenai Presiden Mugabe yang ditulis oleh David Smith, Colin Simpson, dan Ian Davies, dalam buku ini berisi masa pencarian jati diri Mugabe, masa perjuangan untuk Zimbabwe, dipenjara, pengasingan Mugabe, hingga terpilihnya Mugabe menjadi Presiden dengan cara pemilihan. Dari buku inilah dijelaskan bagaimana Mugabe mengalami proses yang membuatnya menjadi sosok yang disegani, dihormati, ditakuti oleh lawan maupun kawannya.

Buku berikutnya berjudul *The Day After Mugabe*. Ini merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan-kumpulan artikel maupun karya ilmiah dari editor majalah, jurnalis BBC, ahli ekonomi, filsuf hingga gubernur bank Zimbabwe (*Reserve Bank of Zimbabwe*). Berbagai artikel tersebut di kumpulan menjadi sebuah buku dan terdiri dari 5 bab. Pertama, *The Home Front* membahas tentang perpolitikan di Zimbabwe mulai dari masa depan ZANU-PF (partai pemerintah di Zimbabwe) ditengah perkembangan politik disana, masa depan Robert Mugabe di pemerintahan Zimbabwe hingga keadaan oposisi di Zimbabwe. Kedua, *Economy and Land* mengkaji permasalahan lahan pertanian di Zimbabwe yang terjadi dengan adanya *LandReform* yang mengakibatkan permasalahan di berbagai daerah, bantuan-bantuan yang ada dari berbagai, lahan pertanian yang disita, kekhawatiran mengenai bantuan asing yang mungkin saja akan membuat Zimbabwe kian terpuruk, hingga solusi-solusi yang diberikan dan diharapkan dapat membuat Zimbabwe lebih baik lagi. Ketiga, *An African Dilemma* mengkaji mengenai permasalahan umum di Zimbabwe seperti pemilihan umum yang seharusnya adil. Namun yang menarik dari bab ini yaitu pemilihan judul artikel yang menurut penulis cenderung menyindir seperti *Rough Justice* (keadilan kasar) dan *Between an Ostrich and a Flamingo* (antara burung unta dan flamingo) dan berisi dilema yang dialami oleh warga Zimbabwe yang diwakili oleh para penulis tersebut. Keempat, *Zimbabwe and The World* yang

mengkaji mengenai hubungan Zimbabwe dengan dunia luar khususnya Inggris yang mengeluarkan kebijakan untuk tidak membantu Zimbabwe, dan juga keadaan Zimbabwe yang disamakan dengan keadaan yang terjadi diberbagai belahan dunia lain. Dan kelima, *Transition* yang mengkaji mengenai proses dan langkah yang ditempuh untuk Zimbabwe yang lebih baik lagi, dan juga berisi kritikan terhadap Presiden Mugabe dan pemerintahan. Dari keseluruhan buku ini berisi mengenai sepak terjang Presiden Mugabe dalam kacamata para penulis tersebut.

Walaupun penulis hanya menjelaskan dua buku yang memfokuskan kepada sosok Presiden Mugabe, namun dalam buku-buku lain yang membahas Zimbabwe, terdapat pula pembahasan mengenai Presiden mugabe yang memiliki peran penting dalam perkembangan Zimbabwe dan diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai sosok Presiden Mugabe.

2.1.2 Zimbabwe

Buku mengenai Zimbabwe yang pertama penulis gunakan berjudul *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika* tulisan dari Abdul Hadi Adnan. Secara garis besar, buku ini berisi mengenai konflik-konflik yang terjadi di negara-negara Afrika dan hubungan internasional negara-negara di Afrika. Kemudian pembahasan buku ini meliputi pula pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik di suatu negara, hubungan negara-negara di Afrika dengan Indonesia, hingga hubungan Afrika dengan dunia Islam. Kendati pembahasan buku ini mencakup seluruh benua Afrika, tetapi Adnan dalam uraiannya membahas secara khusus tentang Zimbabwe dalam satu sub-bab. Pembahasan mengenai Zimbabwe yang ada di dalam buku ini meliputi keadaan awal suku bumiputrapnya, kedatangan imperialisme Barat, kondisi politik di Zimbabwe. Akan tetapi, pembahasan mengenai Zimbabwe dalam buku ini tidak terlalu menguraikan mengenai keadaan sosial-ekonomi di negara tersebut. Adnan hanya fokus terhadap konflik yang terjadi dan hubungan Zimbabwe dengan dunia internasional.

Buku berikutnya tulisan David Harold-Barry berjudul *Zimbabwe The Past is The Future*. Dalam buku ini menginformasikan perdebatan yang sedang berlangsung, dari segi ekonomi yang menjadi fokus pembahasan yaitu landreform, dan penurunan ekonomi yang pesat sejak tahun 2000, dari segi kesehatan pembahasannya mengenai penyakit HIV/AIDS yang terjadi disana. Banyak orang-orang yang berkompeten yang turut andil dalam penulisan buku ini, baik di bidang akademik, agama, dan politik, semuanya terbagi menjadi 15 bab. Dalam buku ini memberikan penulis informasi yang berguna untuk penelitian pada bagian landreform, penurunan ekonomi, dan penyakit yang melanda Zimbabwe.

Buku selanjutnya berjudul *Our Zimbabwe*. Buku yang ditulis oleh Arthur J.D. Patsanza mengkaji tentang keadaan politik ekonomi di Zimbabwe dari zaman kolonial sampai tahun 1988, pembahasan mencakup konstitusi Zimbabwe, sistem pemerintahan, dalam buku ini juga terdapat lampiran berupa laporan presiden, dan juga laporan-laporan ekonomi dari tahun 1980-1988. Buku ini berguna untuk melengkapi pembahasan mengenai kondisi negara Zimbabwe pada awal kemerdekaan.

Buku berikutnya berjudul *Basic Info Negara Republik Zimbabwe*, berisi mengenai informasi umum negara Zimbabwe mulai dari parlemen pemerintahan, perkembangan dalam negeri, indikator ekonomi, kebijakan moneter baru Bank Sentral Zimbabwe (RBZ), hubungan luar negeri Zimbabwe dengan dunia Internasional, dan yang terakhir hubungan luar negeri dengan Indonesia, buku yang dikeluarkan oleh Kedubes RI di Zimbabwe ini memberikan informasi keadaan Zimbabwe secara umum yang dapat berguna untuk penelitian penulis.

Buku yang terakhir berjudul *Zimbabwe: The Terrain of Contradictory Development*. Profil yang berfokus pada kesinambungan dan discontinuities dalam pola-pola historis ekonomi politik di Zimbabwe. Ini adalah potret sebuah negara yang berpotensi dapat menjadi kebanggaan Afrika, tetapi juga mungkin hanya contoh lain dari sebuah negara yang visi sosialis belum membuahkan hasil.

2.2 Konsep-Konsep

Sebelum menjabarkan beberapa konsep sebagai penunjang topik penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan memaparkan pengertian konsep itu sendiri. Konsep menurut Schwab (dalam Supardan, 2011, hlm. 52) mengemukakan ‘konsep merupakan abstraksi, konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan dan pengalaman-pengalaman kompleks.’ Pendapat ini sejalan dengan pengertian konsep menurut James A. Banks (dalam Supardan, 2011, hlm. 52) ‘konsep adalah suatu kata abstrak atau frase yang bermanfaat untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan suatu kelompok berbagai hal, kelompok atau peristiwa.’ Berikut ini akan penulis uraikan penjelasan dari masing-masing konsep sebagai penunjang bahasan dalam skripsi ini.

2.2.1. Pemerintahan

Pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah adalah sebuah organisasi yang memiliki 1) otoritas memerintah dari sebuah unit politik, 2) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik, 3) aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan, 4) kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan keputusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah (Sumaryadi, 2013, hlm. 17).

Dalam suatu pemerintahan biasanya terdapat beberapa sistem yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu berupa sistem :

- a. Monarki, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Monarki merupakan pemerintahan dimana raja menjadi kepala negara.
- b. Despotisme, Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin raja, dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba.

- c. Kediktatoran, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang memiliki kekuasaan penuh atas negaranya.
- d. Oligarkhi, pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau memiliki hubungan kekeluargaan.
- e. Plutoraksi, pemerintahan yang berasal dari kelas atau dikuasai oleh kelompok kaya.
- f. Demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.
- g. Teokraksi, pemerintahan yang dipegang oleh para elit keagamaan.
- h. Anarkhi, sebuah pemerintahan yang lemah.

Selain itu menurut Finer (1974) dalam Sumaryadi yang mengklasifikasikan pemerintah kedalam empat pengertian, yakni; 1) pemerintah mengacu pada proses pemerintah yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang, 2) istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan, 3) pemerintah acapkali berarti orang- orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga artinya kantor atau jabatan- jabatan dalam pemerintahan, 4) istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

2.2.2. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan untuk bertindak atau memerintah sehingga dapat menyebabkan orang lain bertindak, pengertian disini harus meliputi kemampuan untuk membuat keputusan mempengaruhi orang lain dan mengatasi pelaksanaan keputusan itu sendiri. Biasanya bisa dibedakan antara kekuasaan yang berarti dalam kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat menyebabkan orang lain tersebut bertindak atas wewenangnya untuk memerintah orang lain. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi

serta keterampilan dalam menentukan bagaimana kekuasaan yang tepat untuk merespon tuntutan situasi.

Menurut Budiarjo (2004, hlm. 35) kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan kegiatan dalam setiap masyarakat, keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama.

Bagian terpenting dan pengertian kekuasaan itu adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang mempengaruhi. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan menggunakan Sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Dalam pengertian yang lebih sempit, kekuasaan dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya dan masyarakat pada umumnya (Surbakti, 1992, hlm. 58).

Kekuasaan pada dasarnya dianggap sebagai suatu hubungan, karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa jadi seseorang individu atau sekelompok orang, demikian juga obyek kekuasaan bisa satu atau lebih dari satu. kekuasaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Kekuasaan adalah alat aktor-aktor internasional untuk berhubungan satu dengan lainnya. Itu berarti kepemilikan, atau lebih tepat koleksi kepemilikan untuk menciptakan suatu kepemimpinan
2. Kekuasaan bukanlah atribut politik alamiah melainkan produk sumber daya material (berwujud) dan tingkah laku (yang tidak berwujud) yang masing-masing menduduki posisi khusus dalam keseluruhan kekuasaan seluruh aktor

3. Kekuasaan adalah salah satu sarana untuk menancapkan pengaruh atas aktor-aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing
4. Penggunaan kekuasaan secara rasional merupakan upaya untuk membentuk hasil dan peristiwa internasional untuk dapat mempertahankan atau menyempurnakan kepuasan aktor dalam lingkungan politik internasional.

Kepemimpinan itu sendiri merupakan kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu. Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Ada beberapa tipe kekuasaan, menurut French dan Raven (<http://dedyahmadkurniady.staf.upi.edu/2015/08/14/bahan-mata-kuliah-kekuasaan-dan-kewenangan>) terdapat lima tipe kekuasaan antara lain:

1. Reward Power (Kekuasaan Penghargaan). Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan.
2. Coercive Power (Kekuasaan Paksaan). Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Tipe koersif ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang mempunyai 'lisensi' untuk menghukum dengan tugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Menurut David Lawless, jika tipe kekuasaan yang koersif ini terlalu banyak digunakan akan membawa kemungkinan bawahan melakukan tindakan balas dendam atas perlakuan atau hukuman yang dirasakannya tidak adil.
3. Referent Power (Kekuasaan Panutan). Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan 'kesukaan' atau liking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraian yang lebih konkrit, seorang pimpinan akan mempunyai referensi

terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya.

4. Expert Power (Kekuasaan Keahlian). Kekuasaan yang berdasar pada keahlian ini, memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan, pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu, kalau bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima jalan pemecahan yang diberikan pimpinan. Inilah indikasi dari munculnya expert power.
5. Legitimate Power (Kekuasaan Legitimasi). Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya (actual power), ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur sosial suatu organisasi, dan terutama pada nilai-nilai kultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah dilegitimasi tersebut.

Jika dilihat dari paparan diatas bahwa kekuasaan hampir selalu berkaitan dengan praktik-praktik seperti paksaan guna mengamankan suatu tindakan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Seharusnya orang-orang yang berada di pucuk pimpinan, bisa mengupayakan untuk sedikit menggunakan cara yang lebih halus. Sebab secara alamiah cara yang paling efisien dan ekonomis supaya bawahan secara sukarela dan patuh untuk melaksanakan pekerjaan adalah dengan cara mempersuasi mereka.

2.2.3. Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008, hlm. 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008, hlm. 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007, hlm. 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007, hlm. 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole*

society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002, hlm. 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008, hlm. 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008, hlm. 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu

biasanya tertuang dalam ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebuah penulisan karya ilmiah berpijak pada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pegangan untuk membedakan maupun untuk saling melengkapi antara sebuah karya ilmiah yang tengah disusun dengan penelitian terdahulu yang telah ada. Begitu pula penelitian terdahulu mengenai Zimbabwe, penulis telah banyak menemukan tulisan mengenai Zimbabwe. Penulis tertarik untuk menganalisis secara lebih dalam pemahaman mengenai keadaan Zimbabwe pada masa pemerintahan Presiden Mugabe. Adapun beberapa penelitian terdahulu baik dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun artikel ilmiah lainnya yang dijadikan penulis sebagai pegangan ketika penyusunan skripsi ini akan diuraikan dibawah ini.

2.3.1 Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Artikel Jurnal

Penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah jurnal David Coltart yang berjudul *A Decade of Suffering in Zimbabwe: Economic Collapse and Political Repression under Robert Mugabe* yang diterbitkan oleh CATO Institute pada bulan Maret 2008. Jurnal ini dibuat ketika Zimbabwe akan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen. Berisi mengenai rekam jejak dari pemerintahan dari tahun 1980-2005 mulai dari pendapatan perkapita, pendapatan dari sumber daya alam yang dimiliki Zimbabwe seperti emas, tembakau, dan gandum hingga pendapatan dari pariwisata. Itu adalah tragedi, karena Mugabe dan kroni-kroninya yang terutama bertanggung jawab untuk krisis ekonomi yang telah merubah salah satu negara paling makmur di Afrika menjadi negara dengan salah satu harapan hidup terendah di dunia. Sejak tahun 1994, harapan hidup rata-rata di Zimbabwe telah jatuh dari 57 tahun sampai 34 tahun untuk wanita dan dari 54 tahun ke 37 tahun untuk pria. Beberapa 3.500 Zimbabwe meninggal setiap minggu dari efek gabungan dari HIV / AIDS,

kemiskinan, dan kekurangan gizi. Setengah juta warga Zimbabwe mungkin telah meninggal sudah. Tidak ada kebebasan berbicara atau perakitan di Zimbabwe, dan negara telah menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi dan membunuh lawan-lawannya. Pada akar masalah Zimbabwe adalah elit politik korup yang memiliki, dengan dukungan internasional yang cukup besar, berperilaku dengan impunitas mengucapkan beberapa dua dekade. elite ini ditentukan untuk bertahan pada kekuasaan tidak peduli apa konsekuensi, jangan sampai dimintai pertanggungjawaban atas genosida di Matabeleland pada awal tahun 1980 dan penjarahan grosir Zimbabwe yang mengikuti reformasi tanah salah urus pada tahun 2000. Ketika perubahan datang ke Zimbabwe, bangsa harus menemukan kembali aturan hukum dan kesucian orang dan harta benda. Wacana publik dan ekonomi harus dibuka kembali. Pemerintah baru harus merangkul ide yang lebih terbatas pemerintah dan membatalkan undang-undang yang membuat pengoperasian sektor swasta tidak mungkin. Selain itu, pemerintah baru harus menemukan cara bagi rakyat Zimbabwe untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh puluhan kekerasan politik.

Penelitian selanjutnya dari artikel ilmiah Lucky Asuelime dan Blessing Simura yang berjudul *Robert Mugabe against All Odds: A Historical Discourse of a Successful Life President?* Yang terbit dalam jurnal *African Renaissance Vol. 10 No. 2, 2013*. Artikel ini berisi di Afrika, konsep kepemimpinan dan pemerintahan dipelihara oleh kepercayaan tradisional di mana kepala atau raja memerintah sampai kematiannya. Peran memimpin ruang politik dan geografis dipandang sebagai hadiah dari para dewa atau Tuhan. Menantang legalitas raja dipandang sebagai menantang Tuhan atau pilihan para dewa 'maka itu adalah kekejian. Ini adalah dalam konteks ini bahwa Mugabe dan kasus Zimbabwe harus lihat menjadi mikrokosmos dari Afrika kompleks yang lebih besar realitas sosial-budaya, sejarah dan politik. Meskipun semua upaya untuk menggulingkan rezim Mugabe dan lembaga sanksi ekonomi terhadap Zimbabwe, krisis gagal menjadi dasar mobilisasi untuk kerusakan sipil dan penggulingan Mugabe. Hal ini juga gagal untuk menggalang dukungan total untuk oposisi yang akan menghasilkan kemenangan elektoral yang akan mengakhiri

pemerintahan Mugabe. Fokus utama dari artikel ini adalah untuk memberikan wacana sejarah tentang bagaimana Mugabe telah berhasil menantang semua intrik internal dan eksternal untuk menggulingkannya dari kekuasaan.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Sue Onslow yang diterbitkan oleh LSE pada Maret 2011 yang berjudul *Zimbabwe and Political Transition*, mengkaji perubahan-perubahan politik yang terjadi di Zimbabwe dan memfokuskan kepada partai Zanu-PF yang ingin menjadi partai tunggal di Zimbabwe dan tercapai tujuan tersebut, penelitian Onslow menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Zanu-PF untuk mencapai tujuan tersebut, dan akibatnya terhadap kondisi negara Zimbabwe, dan hal tersebut yang ingin penulis teliti, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Onslow berguna untuk melengkapi penelitian penulis pada bagian akibat kebijakan Presiden Mugabe terhadap negara Zimbabwe.

Selanjutnya laporan dari *Catholic Commission for Justice and Peace* berjudul *Report on the Disturbances in Matabeleland and the Midlands 1980-1988*, berisi laporan mengenai kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Zimbabwe, dan mengakibatkan banyak kerugian, dan dalam melakukan penelitiannya mereka mewawancarai warga yang menjadi korban kerusuhan tersebut dan membuat timelinenya sehingga memudahkan penulis dalam mengetahui peristiwa yang terjadi disana dalam kurun waktu 1980-1988.

2.3.2 Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Skripsi

Kemudian penulis juga menemukan skripsi yang ditulis oleh Monjy Minomahasetra yang berjudul “Peran Southern African Development Community (SADC) dalam Mengatasi Krisis di Zimbabwe”. Penelitian ini membahas tentang Krisis di Zimbabwe berawal paska pemilu anggota parlemen dan Presiden pada 29 Maret 2008. Kekalahan Robert Mugabe dan partai politiknya *Zimbabwe African National Union- Patriotic Front* (ZANU-PF) oleh Morgan Tsvangirai dan partainya *Movement for Democratic Change* (MDC), menjadi masalah karena Robert Mugabe tidak mau mengakui kekalahannya. Zimbabwe adalah satu negara anggota *Southern*

African Development Community (SADC) maka SADC mengambil peran sebagai mediator dan melaksanakan *peacebuilding* untuk mengatasi krisis di Zimbabwe. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dimana penelitian ini memiliki fokus tahun 2008- 2013, sedangkan penulis fokus penelitiannya pada tahun 1980 – 2008.

Penulis juga menemukan skripsi yang disusun oleh Warih Lesty Handanu (tahun 2010) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Dinamika Konflik Politik di Zimbabwe Tahun 2008 - 2009”. Pada intinya penelitian ini mengungkapkan Konflik politik yang terjadi di Zimbabwe yang terjadi tahun 2008 yang disebabkan oleh pemilihan presiden yang berakhir kisruh. Penelitian ini berkaitan dengan skripsi yang diajukan penulis karena persamaan tempat dan tokoh yang ingin penulis teliti, dan perbedaannya terdapat pada fokus tahun pembahasan.